

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Hukum Islam (Studi KUA Kabupaten Tulungagung).” ini ditulis oleh Septi Nuril Fuadati, NIM. 2822133018, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh Dr. H. A. Hasyiem Nawawie, S. H, M.Si

Kata Kunci: Keabsahan, Perkawinan , Wanita Hamil, Pra Nikah, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, KHI, Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi dengan maraknya fenomena perkawinan wanita hamil pra nikah di Kabupaten Tulungagung. Perkawinan tersebut dilakukan untuk menutupi aib bagi pelakunya, kemudian terdapat indikasi tentang simpang siur kejelasan status keabsahan perkawinan tersebut. Sehingga hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian perkawinan wanita hamil pra nikah yang mana memiliki tujuan untuk mengetahui tentang keabsahan status perkawinannya yang mana ditinjau dari segi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam dengan studi di KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, Kauman.

Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) bagaimana fenomena perkawinan wanita hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, dan Kauman?, (2) bagaimana fenomena perkawinan wanita hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, dan Kauman, ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974?, (3) bagaimana fenomena perkawinan wanita hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, dan Kauman, ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?, (4) bagaimana fenomena perkawinan wanita hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, dan Kauman,ditinjau dari hukum islam?. Tujuan dari dalam penelitian ini adalah 1).untuk mengetahui bagaimana fenomena perkawinan wanita hamil pra nikah di KUA Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Tulungagung serta untuk mengetahui seberapa sering perkawinan wanita hamil pra nikah terjadi di KUA Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Tulungagung, 2). Untuk mengetahui fenomena serta keabsahan perkawinan wanita hamil pra nikah di KUA Kecamatan Ngantru, Kauman, Kedungwaru, dan Tulungagung menurut tinjauan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 3). untuk mengetahui fenomena serta keabsahan perkawinan wanita hamil pra nikah di KUA Kecamatan Ngantru, Kauman, Kedungwaru, dan Tulungagung dalam ketentuan KHI tentang, 4). untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam tentang fenomena serta keabsahan perkawinan wanita

hamil pra nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Ngantru, Kauman, Kedungwaru, dan Tulungagung.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik *interview* (wawancara), dokumentasi, dan observasi. Interview digunakan untuk menanyakan sesuatu yang terkait dengan keabsahan perkawinan wanita hamil pra nikah pada Beberapa KUA di Kabupaten Tulungagung. Metode dokumentasi untuk memperkuat dari segala pernyataan dengan hasil interview dari para kepala KUA Kabupaten Tulungagung. Sedangkan metode observasi digunakan untuk mengamati tentang pemahaman para kepala KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, dan Kauman tentang keabsahan perkawinan wanita hamil pranikah yang terjadi di masing – masing KUA tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, Kauman yang ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Hukum Islam menunjukkan bahwa: (1). Ada lebih dari 15% kasus perkawinan wanita hamil pra nikah yang terjadi setiap tahunnya di KUA Kecamatan Ngantru, Kedungwaru, Tulungagung, dan Kauman. (2). Pada dasarnya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak membahas tentang perkawinan wanita hamil pra nikah namun, dengan adanya pasal Pasal 2 ayat 1 yang mentakan bahwa “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu” dengan kata lain selama perkawinan tersebut tidak melanggar aturan agama dan Negara hukumnya adalah sah. (3). Untuk KHI sendiri secara khusus membolehkan dan mengesahkan perkawinan wanita hamil dengan syarat yang menikahi adalah orang yang menghamili dan jika perkawinan itu sudah terjadi maka tak perlu dilakukan pernikahan ulang ketika si jabang bayi tersebut lahir sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 1,2,dan 3. (4) Dalam pemaparan yang dikemukakan oleh hukum islam di Indonesia sendiri membolehkan perkawinan wanita hamil sebagaimana yang dijelaskan oleh madzhab syafi’iyah dan hanafiyah dan di Indonesia sendiri memang menggabungkan kedua perdapat madzhab tersebut dalam pengadaan peraturan yang ada, namun ada juga madzhab yang tidak memperbolehkan seperti madzhab malikiyah dan hanabillah yang melarang dengan keras dan tegas perkawinan dengan wanita yang dalam keadaan hamil karena zina.

ABSTRACT

Thesis by the title "The Legality of pre-marriage pregnant Women is Viewed from the Marriage Act No. 1, 1974, KHI, and Islamic Law (Study about religious Affairs office Tulungagung District). This is written by Septi Nuril Fuadati, NIM. 2822133018, Department of Islamic Family Law, Faculty of Shari'ah and Law Sciences, State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, mentored by Dr. Ir. H. A. Hasyiem Nawawie, S. H, M. Si

Keywords: Legality, Marriage, Pregnant Woman,

The research in this thesis is motivated by the marriage phenomenon of pre-marriage pregnant woman in Tulungagung District. The marriage is done to cover the disgrace for the culprit. The marriage study of pre-marriage pregnant women aims to know about the validity of marital status which is in terms of Marriage Law no. 1, 1974, Compilation of Islamic Law, and Islamic Law with study in religious Affairs office of Ngantru District, Tulungagung, Kedungwaru, Kauman.

The focus of research in writing this thesis is (1) how is pregnant woman marriage phenomenon in religious Affairs office of Ngantru Subdistrict, Tulungagung, Kedungwaru, and Kauman, (2) how is pregnant marriage phenomenon in religious Affairs office of Ngantru Subdistrict, Tulungagung, Kedungwaru, and Kauman, Marriage. (3) How is the phenomenon of pre-marriage pregnant women in religious Affairs office Ngantru District, Tulungagung, Kedungwaru, and Kauman, (4) How is the phenomenon of marriage of pregnant women in religious Affairs office Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru and Kauman subdistricts, In terms of Islamic law. The purpose of this research is 1). To know how the marriage phenomenon of pregnant pregnant women in religious Affairs office Ngantru District, Kauman Subdistrict, Kedungwaru Subdistrict, and Tulungagung District and to know how often the marriage of pregnant women

occurred in religious Affairs office Ngantru District, Kauman District , Kedungwaru District, and Tulungagung District, 2). To know the phenomenon and legality of pre-marriage pregnant women in religious Affairs office of Ngantru, Kauman, Kedungwaru, and Tulungagung subdistricts according to the review of Marriage Law no. 1, 1974, 3). To know the phenomenon and the legality of pre-marriage pregnant women in religious Affairs office of Ngantru, Kauman, Kedungwaru, and Tulungagung sub-districts in terms of KHI, 4). To find out how the Islamic legal perspective on the phenomenon as well as the legality of pre-marriage pregnant women that occurred in religious Affairs office Ngantru District, Kauman, Kedungwaru, and Tulungagung.

Type of research in this thesis is a type of qualitative research by using interview techniques (interview), documentation, and observation. Interviews are used to inquire about the legitimacy of pre-married pregnant women in some religious Affairs offices in Tulungagung District. Documentation method is used for strengthening of all statements with the results of interviews from the heads of religious Affairs office Tulungagung District. While the observation method is used to observe about the head understanding of religious Affairs office of Ngantru District, Tulungagung, Kedungwaru, and Kauman about the legality of pre-marriage pregnant women that is occurred in each of these religious Affairs offices.

Based on research conducted by researchers at religious Affairs offices Ngantru District, Tulungagung, Kedungwaru, Kauman, reviewed from the Marriage Law no. 1, 1974, KHI, and Islamic law as a whole says it is lawful for women who become pregnant because of adultery is not an illegitimate woman, as well as the opinion of Marriage Law No.1, 1974, KHI which states the legality of marriage of pre-married pregnant women. Whereas according to Islamic law there are still scholars' who allow and not, but the majority claim the marriage is punished legitimately.